

# PEREMPUAN, ASET DESA, DAN SUMBER PENGHIDUPAN: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur

M. Zainal Anwar dan Rajif Dwi Angga

IAIN Surakarta dan IRE Yogyakarta

zainalanwar@gmail.com dan rajif.fisipolugm@gmail.com

## Abstrak

Artikel ini fokus pada upaya optimalisasi aset desa, terutama aset fisik atau sumber daya alam dalam upaya memperluas sumber penghidupan di desa. Melalui metode wawancara, observasi dan FGD, tulisan ini menyajikan tiga kasus untuk memperdalam dinamika perempuan dan ekonomi desa berbasis aset. Tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan desa bisa menjadi profil warga aktif dalam mendorong ekonomi desa dengan cara berorganisasi serta memanfaatkan aset desa dalam rangka menemukan sumber penghidupan. Ini tentu kontras dengan persepsi yang selama ini berkembang bahwa perempuan desa hanyalah pelengkap dalam tata kehidupan di desa. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa aset desa memiliki kontribusi penting dalam menopang dan menggerakkan sumber penghidupan warga. Pemetaan aset juga berguna menjadi pijakan dalam upaya memperluas sumber penghidupan warga agar tidak terkungkung hanya mengandalkan satu sumber penghidupan saja. Industri kerupuk yang dikelola perempuan desa adalah bukti konkrit mengenai peran perempuan desa dalam menggerakkan ekonomi warga sekaligus berupaya mengolah bahan mentah di desa menjadi produk olahan yang siap jual. Dalam konteks tersebut, pemetaan aset adalah salah satu instrumen penting dalam menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga desa.

**Kata Kunci:** perempuan, kelompok marjinal, aset desa, ekonomi desa, sumber penghidupan

## Abstract

This article focuses on the efforts to optimize village assets, especially physical assets or natural resources in an effort to increase livelihoods in the village. Through interview, observation and FGD methods, this paper presents three cases to deepen the dynamics of women and the economics of asset-based village. This paper shows that village women can be the figures of active citizens in promoting the village economy by organizing and utilizing the village assets in order to have a source of livelihood. This is certainly contrasted with the perception that the village women are only complementary in the life of the village. In addition, this paper shows that village assets have an important contribution in supporting and mobilizing the livelihoods of the citizens. Asset mapping is also useful as a base to increase the livelihoods of the people, so that they do not rely on one source only. The village-cracker industry is a proof of the role of village women in mobilizing people's economy, processing raw materials into ready products and sold. In this sense, asset mapping is one of the important instruments that contribute to prosperity and happiness of the villagers.

**Keywords:** women, marginalized groups, village assets, village economics, livelihoods

## Pendahuluan

Pengelolaan aset di desa dalam upaya mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan sering kali dibatasi hanya urusan laki-laki. Se-

mentara perempuan desa dianggap cukup berperan di ranah domestik saja, seperti mengurus rumah tangga, mengantarkan makanan ke sawah, atau mencari air bersih untuk kebutu-

han rumah tangga. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan aset untuk kepentingan ekonomi maupun dalam rangka menemukan penghidupan berkelanjutan tidak banyak diungkap.

Dengan memanfaatkan perspektif *sustainable livelihoods*, tulisan ini ingin melihat bagaimana perempuan di desa terlibat dalam pengelolaan aset desa dan memanfaatkannya dalam konteks pengembangan sumber penghidupan. *Sustainable livelihoods* atau sumber penghidupan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mengombinasikan antara kemampuan, keadilan, dan keberlanjutan dalam menjaga aset (baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat) guna memperoleh kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan. Penghidupan dikatakan memiliki dimensi *sustainable* atau berlanjut jika mampu bertahan menghadapi berbagai goncangan maupun tekanan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, upaya menjaga aset ini sejalan dengan salah satu tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yakni menjaga harta benda. Merujuk pada al-Ghazali, Umer Chapra menekankan bahwa menjaga harta benda adalah instrumen penting dalam kerangka menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa menjadi alat kesejahteraan, harta benda atau aset yang dijaga dan diperoleh harus dialokasikan secara efisien dan dibagi secara adil.<sup>2</sup>

Lalu, mengapa perempuan? Perempuan desa adalah aktor berwajah ganda. Pada satu sisi,

perempuan desa adalah komponen kelompok warga desa yang miskin dan rentan dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi, di sisi lain, perempuan desa merupakan kekuatan utama di desa, terutama dalam hal mengelola dan memanfaatkan aset desa. Penguasaan aset dan adanya akses tentu membutuhkan keberlanjutan. Inilah yang disebut strategi penghidupan. Secara ringkas, strategi penghidupan adalah portofolio penghidupan berkelanjutan seseorang yang bisa ditempuh melalui strategi pertanian, non-pertanian dan/atau melakukan migrasi, bahkan berorganisasi.<sup>3</sup>

Di samping itu, berbekal perspektif penghidupan berkelanjutan, tulisan ini juga ingin memperlihatkan bahwa perempuan desa adalah profil warga aktif yang mampu mencari dan mengoptimalkan aset desa serta mengembangkan penghidupan berkelanjutan untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Para perempuan desa ini memilih berorganisasi sebagai salah satu strategi nafkah dalam rangka mengembangkan penghidupan berkelanjutan.

Sebelum UU Desa disahkan pada 2014, berbagai studi tentang desa dan secara khusus tentang perempuan desa mulai dilakukan. Tidak saja untuk membuktikan bahwa perempuan desa juga memiliki kontribusi positif dalam kehidupan desa, tetapi sekaligus untuk bukti dalam advokasi perumusan UU Desa.<sup>4</sup> Terkait

---

<sup>3</sup>Sutoro Eko, dkk, *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*, (Yogyakarta: IRE dan ACCESS Phase II, 2013), 5.

<sup>4</sup>Arnaldo Pellini, Maesy Angelina, dan Endah Purnawati, *Bekerja Secara Politis; Sebuah Cerita Perubahan Mengenai Kontribusi Bukti Penelitian terhadap Perumusan Undang-Undang Desa di Indonesia*, (TT: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), Knowledge Sector Initiative (KSI), dan DFAT Australia, 2014).

---

<sup>1</sup>Chambers, R., & Conway, G. *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*. Institute of Development Studies (UK), 1992.

<sup>2</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia, 2000), 26.

hubungan perempuan desa dan penghidupan berkelanjutan, studi Hariyanto,<sup>5</sup> Qomariyah dan Kurniawan,<sup>6</sup> serta Mariana dan Eko<sup>7</sup> menunjukkan bahwa perempuan desa adalah kelompok warga yang aktif dalam mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mendirikan organisasi ekonomi berbasis perempuan desa di mana salah satu tujuannya adalah menemukan dan mengembangkan aset desa untuk memperoleh sumber penghidupan. Keberadaan organisasi ekonomi yang diinisiasi perempuan desa tersebut menjadi salah satu strategi nafkah yang dikembangkan perempuan desa untuk menjaga penghidupannya.

Jika beberapa tulisan di atas memiliki konteks sebelum lahirnya UU Desa, tulisan ini merupakan salah satu penelusuran awal untuk melihat bagaimana para aktor khususnya perempuan memanfaatkan aset yang dimiliki pasca disahkannya UU Desa. Tulisan ini berasal dari

---

<sup>5</sup>Titok Haryanto, "Warga Bergerak Melawan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara," *Research Report* dalam program bertajuk "Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan". IRE Yogyakarta bekerjasama dengan AUSAID ACCESS Tahap II, 2012.

<sup>6</sup>Puji Qomariyah dan Borni Kurniawan, "Perempuan Soreang Melawan Rejim Pasar Uang: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan," *Research Report* dalam program bertajuk "Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan". IRE Yogyakarta bekerjasama dengan AUSAID ACCESS Tahap II, 2012.

<sup>7</sup>Dina Mariana dan Sutoro Eko, "Memanfaatkan Modal Sosial Menjadi Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Research Report* dalam program bertajuk "Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan". IRE Yogyakarta bekerjasama dengan AUSAID ACCESS Tahap II, 2012.

riset kualitatif (observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan *focus group discussion*) yang dilaksanakan di desa Gadungan, Bli-tar pada minggu kedua-ketiga Desember 2015 dengan pertanyaan utama seputar bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis aset desa serta bagaimana potensi dan kapasitas BUMDes dalam mengelola aset desa serta keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal di dalamnya.

Pasca pengesahan UU Desa, desa dan tentunya warga desa memiliki peluang untuk menjadi desa mandiri. Marwan Ja'far<sup>8</sup> menegaskan bahwa desa mandiri adalah desa yang mampu mengoptimalkan aset dan potensi di desa menjadi sumber penghidupan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kebutuhan desa dan warganya. Uang yang masuk ke desa, misalnya dana desa atau alokasi dana desa, memang bisa menjadi faktor pendorong tumbuhnya ekonomi desa sekaligus menopang sumber penghidupan warga, tetapi harus berpijak pada perencanaan yang matang dan skema pertanggungjawaban yang memadai disertai keterlibatan warga.

Secara sosiologis, Dharmawan<sup>9</sup> menekankan bahwa desa merupakan entitas sosial dan ekologi di mana warganya secara individu atau berkelompok mengembangkan sistem penghidupan atau sistem nafkah (*livelihood sys-*

---

<sup>8</sup>Marwan Ja'far, "Kata Pengantar" dalam Sunaji Zamroni, dkk, *Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta dan Knowledge Sector Initiative, 2015), ii.

<sup>9</sup>Arya Hadi Dharmawan, "Kata Pengantar" dalam Sunaji Zamroni dkk, *Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan*, (Yogyakarta, IRE Yogyakarta dan Knowledge Sector Initiative, 2015), xi.

tem) melalui pertukaran dengan alam sekitarnya. Dengan begitu, menempatkan desa sebagai arena penghidupan berkelanjutan adalah gagasan kontekstual dan relevan dengan UU Desa.<sup>10</sup>

Lantas, mengapa memilih Desa Gadungan? Desa Gadungan adalah profil desa yang terletak di kaki Gunung Kelud (6-7 km dari puncak). Memiliki banyak aset mulai dari sumber daya alam yang melimpah, namun warga desa yang pekerja keras memiliki beberapa paradoks. Walau kaya SDA, mayoritas tidak dimiliki warga. Lahan tanah dan kebun bukanlah milik warga, tetapi “dikuasai” pihak lain. Sebutan “petani KTP” adalah gambaran untuk menyebutkan nasib warga yang memilih profesi bertani atau berkebun, tetapi tidak punya lahan alias petani gurem atau buruh tani/buruh kebun.

### **Profil Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur**

Desa Gadungan berada di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Secara geografis, desa ini memiliki karakter topografi daerah dataran sedang (156 mdpl). Desa ini berjarak hanya sekitar 6-7 km di bawah lereng Gunung Kelud di sisi selatan. Jarak ini menjadikan desa ini menjadi kawasan rawan bahaya letusan Kelud, terutama lahar dingin yang mengalir sungai-sungai yang melintasi desa ini. Desa Gadungan berbatasan dengan kawasan hutan milik Perhutani dan Perkebunan di sebelah utara, sebelah timur bersebelahan dengan Desa Ngaringan, Desa Gandusari di sebelah selatan, dan di sebelah barat dengan Desa Sukosewu. Terdapat

tujuh dusun di desa ini: (1) Dusun Gadungan, (2) Dusun Sandangrejo, (3) Dusun Sukosari, (4) Dusun Dawuhan, (5) Dusun Putukrejo, (6) Dusun Dermosari, dan (7) Dusun Sukomulyo yang berbatasan langsung dengan kawasan perkebunan. Jumlah penduduk desa ini sekitar 7.733 jiwa dengan 2.125 kepala keluarga. Kemiskinan di desa ini dapat dikatakan cukup tinggi. Setidaknya ini tampak dari data keluarga prasejahtera yang berjumlah 535 KK dan 635 KK masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera I).

Sumber penghidupan utama masyarakat desa ini ada di sektor pertanian sebanyak 60,03% dari total jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian sekitar 219 ha dan lahan perkebunan serta pekarangan subur seluas 328 ha.<sup>11</sup> Dari segi penggunaan lahan, luas lahan kering di desa ini mencapai sekitar 148 ha lahan yang diperuntukkan untuk bangunan/tempat tinggal, 108 ha untuk tegal/pekarangan, dan 600,5 ha dikuasai perkebunan besar. Data ini menunjukkan bahwa luas Desa Gadungan sebagian besar didominasi oleh kawasan perkebunan. Meski demikian, di samping sektor pertanian, potensi ternak di Desa Gadungan cukup tinggi. Potensi ternak sapi perah mencapai angka sekitar 459 ekor dan sapi potong sebanyak 885 ekor, dengan jumlah peternak sapi mencapai 132 orang. Jumlah ternak kambing sekitar 1.121 ekor dan domba 224 ekor, dan ayam ras 53.100 ekor.<sup>12</sup>

Desa Gadungan sebenarnya memiliki beragam jenis aset desa. Mulai dari aset SDA (perkebunan, sawah, air, pasir), aset SDM (ten-

<sup>10</sup>Sunaji Zamroni dkk, *Desa Mengembangkan Sumber Penghidupan Berkelanjutan*, (Yogyakarta, IRE Yogyakarta dan Knowledge Sector Initiative (KSI), 2015), 23.

<sup>11</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gadungan tahun 2014-2019.

<sup>12</sup> BPS Kabupaten Blitar 2015.

aga kerja terampil, buruh tani, buruh kebun), aset sosial budaya (arisan, anjangsana, paguyuban), dan aset fisik (pasar desa). Jika ditilik dari asal-muasalnya, ada aset desa yang berasal dari kekayaan asli desa (lahan kebun, pasar desa) dan ada pula yang berasal dari hibah (aset eks-PNPM). Belum ditemukan cerita tentang pembelian barang yang kemudian menjadi aset desa dengan menggunakan anggaran dari APBDesa. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi aset desa pada umumnya masih dapat dimanfaatkan dengan baik.

### **Dinamika Ekonomi Desa Berbasis Aset**

Tipologi desa Gadungan adalah wilayah dengan karakter utama area pertanian dan perkebunan. Kedua aset SDA ini bisa dikatakan sebagai penggerak dan basis utama sumber penghidupan warga. Sebagai gambaran, merujuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 Desa Gadungan, ada 2114 orang atau sekitar 60.03% bekerja di sektor pertanian. Sisanya tersebar di berbagai sektor, seperti sektor jasa pemerintahan, perdagangan, angkutan, hingga industri. Walaupun mayoritas warga desa bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, tetapi mayoritas mereka bukanlah pemilik lahan, tetapi buruh tani atau buruh kebun.

Tulisan ini mengajukan tiga kasus untuk melihat dinamika ekonomi desa berbasis aset

desa.<sup>13</sup> Kasus pertama mengenai revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); kasus kedua terkait aktivitas beternak sapi perah; dan kasus ketiga bercerita tentang aktivitas ekonomi perempuan Desa Gadungan.

### **Ekonomi Berbasis Aset Kelembagaan: Kasus BUMDesa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Gadungan sejatinya baru saja menggeliat. Sebelumnya di Desa Gadungan telah ada BUMDesa yang mengelola aset pasar desa. Keberadaan BUMDesa mulai direvitalisasi sejak Oktober 2015 setelah beberapa waktu mengalami vakum. Pasar Desa “Ngentak” tak hanya menjadi arena penghidupan warga desa, namun juga mampu mendekatkan kebutuhan warga. Kehadiran pasar desa di Gadungan terbilang cukup lama, karena telah berdiri sejak 1972. Awalnya, lokasi pasar desa terletak di depan kantor desa. Pada 1977, lokasinya dipindahkan ke lokasi saat ini. Tanah dan bangunan pasar desa adalah milik desa, meskipun dalam prosesnya warga desa yang berjualan di dalamnya membuat bangunan tambahan sendiri. Dengan kata lain, status kepemilikan pasar desa ini jelas milik desa dan dimanfaatkan penggunaannya oleh warga desa untuk berdagang. Di Kecamatan Gadungan sendiri, Pasar Ngentak merupakan pasar desa terbesar dan paling bergeliat dengan perputaran ekonomi tertinggi. Kepala desa sendiri berpandangan bahwa uang yang ada di desa tidak boleh keluar dari desa dan agar perputaran uang bisa dioptimalkan di Desa Gadungan untuk meningkatkan geliat ekonomi warga. Atas dasar itu, penataan aset yang ada di desa menjadi agen-

---

<sup>13</sup>M. Zainal Anwar dan Rajif Dri Angga, “Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Aset Desa: Studi Kasus Desa Gadungan Kabupaten Blitar Jawa Timur”, *Research Report*, IRE Yogyakarta, Knowledge Sector Initiative (KSI) dan OXFAM GB, Desember 2015 – Januari 2016, 17.

da utama kebijakan pemerintah desa saat ini.<sup>14</sup>

Menurut ibu Nur, perempuan desa paro baya yang berjualan di pasar desa sekitar 25 tahun, tanah pasar desa termasuk kios yang dia tempati adalah milik desa. “Tetapi, saya membuat bangunan tambahan agar lebih enak dibuat berjualan. Misalnya kalau musim hujan biar tidak kehujanan,” kata ibu Nur. Dia sendiri memiliki 1 kios utama dan 3 lapak kecil. Untuk kios utama, setiap hari ia membayar retribusi sebesar Rp. 500,00 dan untuk satu lapak kecil memberi retribusi Rp 300,00. “Selain retribusi, saya juga membayar biaya keamanan sebesar Rp. 1500-2000,00 setiap malam,” kata warga Dusun Dermosari Desa Gadungan.<sup>15</sup>



Gambar 1. Aktivitas jual beli di Pasar Desa Ngentak (dok.IRE)

Keberadaan pasar desa ini sangat penting bagi warga, karena ikut menopang sumber penghidupan warga desa. Mayoritas pedagang

di pasar desa adalah warga Desa Gadungan. Dengan berjualan di pasar desa, banyak warga yang bisa menghidupi keluarganya. Namun di sisi lain, keberadaan pasar desa belum banyak memberi pendapatan optimal ke pemerintah desa dalam bentuk pendapatan asli desa (PADes). Menurut Widodo, Kepala Desa Gadungan, pasar desa yang terdiri dari 50-60 kios tersebut setiap bulannya hanya memberikan pendapatan sekitar Rp 500.000/bulan saja ke desa. Nominal tersebut belum termasuk potongan untuk upah mantri pasar, petugas kebersihan, dan pembelian karcis. Dengan demikian, pendapatan bersih yang diterima desa hanya sekitar Rp 250.000-300.000 per bulan. Hal ini tentu saja tak sebanding dengan ramainya aktivitas ekonomi pasar desa.

Potensi sumber keuangan desa tersebut kemudian ditangkap oleh pihak pemerintah desa dengan melakukan penyegaran terhadap pengelolaan pasar desa tersebut. Selama ini, BUMDesa Gadungan yang mengelola aset pasar desa masih belum optimal menjalankan fungsinya. “Pengelola pasar desa ada di BUMDesa. Mereka ini punya jiwa amanah atau bisa dipercaya. Tapi karena sibuk dengan kegiatan masing-masing hingga tidak sempat mengurus BUMDesa dengan optimal,” kata Sutopo, Kaur Pemerintahan Desa Gadungan.<sup>16</sup> Sejalan dengan itu, Suryadi (Pengelola BUMDesa Gadungan) menyatakan bahwa kurang optimalnya pengelolaan aset desa ini lebih banyak disebabkan karena kesibukan masing-masing pengurus yang

<sup>14</sup> Wawancara dengan Widodo, Kepala Desa Gadungan pada tanggal 14 Desember 2015 di kediaman Kades Gadungan.

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu Nur, pedagang di pasar desa Desa Gadungan pada 17 Desember 2015 di kiosnya di pasar desa Desa Gadungan.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sutopo, Kaur Pemerintahan Desa Gadungan pada 17 Desember 2015 di Kantor Desa Gadungan Kabupaten Blitar.

belum fokus dalam mengelola pasar desa.<sup>17</sup>

Atas dasar persoalan tersebut, pemerintah desa kemudian menyelenggarakan musyawarah desa dengan agenda revitalisasi BUMDesa sekaligus pemilihan pengurus BUMDesa yang diperkuat dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Pasar Desa pada kuartal akhir 2015. Pada waktu melakukan riset di akhir Desember 2015, peneliti memperoleh naskah rancangan Peraturan Desa Tahun 2015 tentang Pengelolaan, Penataan, dan Pengembangan Pasar Desa Gadungan dari Ketua BPD Sutomo.<sup>18</sup> Dalam rancangan Perdes tersebut, tepatnya di pasal 5, dengan jelas disebutkan bahwa pasar desa dikelola oleh BUMDesa melalui unit usaha Pengelola Pasar. Otoritas pengelolaan pasar desa mencakup sejumlah aspek, di antaranya: a) merencanakan pengelolaan pasar desa, b) mengelola, memelihara dan melindungi aset yang dimiliki, c) melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang, d) memungut sewa lahan, toko, kios, gudang dan fasilitas lainnya, e) melaporkan kegiatan pengelolaan setiap bulan kepada kepala desa selaku komisaris BUMDesa. Setelah revitalisasi dilakukan, pendapatan yang masuk ke desa sekitar Rp 1-1,5 juta per bulan atau mengalami peningkatan lebih dari 100%.

Ke depan, BUMDes akan memiliki sistem karcis tersendiri. Hingga riset ini dilakukan, langkah ini tinggal menunggu pengesahan Perdes Pasar Desa. Sistem karcis ini diterapkan

agar pengelola dapat mengontrol pendapatan pasar desa. Menurut Suryadi, selama ini desa tak pernah memungut sama sekali biaya melalui karcis karena dikuasai oleh pihak lain di luar desa. Selain itu, penataan pedagang agar mereka tidak berjualan di pinggir jalan juga menjadi langkah prioritas. Kesemrawutan tata kelola pasar desa Ngentak salah satunya disebabkan oleh banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, sementara di sisi lain masih banyak kios-kios di bagian dalam yang tak termanfaatkan. Kondisi semacam ini juga disebabkan oleh pembeli yang juga lebih memilih untuk bertransaksi jual beli di lokasi yang lebih terjangkau di pinggir jalan.<sup>19</sup>

Selain itu, pengurus BUMDes juga tengah mendata kios yang ada, karena para Pengurus BUMDes mensinyalir selama ini ada praktik mafia kios di Pasar Ngentak. Mereka memanfaatkan kekuatan modal mereka untuk membeli kios-kios dan kemudian menyewakannya dengan harga yang telah diatur oleh mafia tersebut. Penataan kios ini juga termasuk pembatasan kepemilikan kios dengan ketentuan satu orang hanya menyewa maksimal dua kios saja. Tujuannya, agar tidak ada monopoli dan memberikan manfaat sosial (*social benefits*) yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut catatan, jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada pengaturan tentang kuota sewa kios, kira-kira Pasar Ngentak hanya didominasi oleh 10 orang pemilik kios saja.

Berdasarkan data pengelola BUMDesa, sekitar 60% pedagang di Pasar Ngentak meru-

<sup>17</sup>Wawancara dengan Suryadi, Pengelola BUMDesa Gadungan pada tanggal 14 Desember 2015 di kantor UPK Gandusari.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Sutomo, Ketua BPD Desa Gadungan dan Ketua Kelompok Tani dan Ternak "Subur" Desa Gadungan pada tanggal 16 Desember 2015 di rumah Bapak Sutomo.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Suryadi, Pengelola BUMDesa Gadungan pada 14 Desember 2015 di rumah kepala Desa.

pakan warga luar Desa Gadungan. Kondisi ini sebenarnya bukan masalah karena karakter penghidupan warga Gadungan yang bergerak di sektor pertanian tanaman pangan, terutama padi dan sektor perdagangan tak terlalu signifikan. Hanya saja, sebagai aset desa yang cukup produktif, Pasar Desa Gadungan tengah dioptimalkan kontribusinya bagi PADesa.

Unit usaha BUMDesa lainnya adalah unit pengelolaan air bersih (PAB). Sebelum diserahkan ke desa sekitar Oktober 2015, unit PAB ini adalah aset milik PNPM. Instalasi pengelolaan air bersih ini berasal dari sumber mata air dari Dusun Dermosari. Saat ini jumlah pelanggannya mencapai 500 rumah tangga yang tersebar di Dusun Dermosari dan Dawuhan. Sejak dikelola BUMDesa, instalasi air bersih tersebut memberikan kontribusi bagi PADesa sekitar Rp 2.000.000. Tiap rumah tangga dikenai tarif Rp 600 per kubik air yang dipakai. Suryadi menuturkan bahwa ke depan BUMDesa Gadungan juga akan merintis unit usaha jual beli input pertanian, seperti pupuk dan unit usaha simpan pinjam.

Unit usaha jual beli pupuk menjadi peluang mengingat kebutuhan yang cukup besar akan pupuk dan produk input pertanian lainnya di Desa Gadungan. Meski demikian, berjalannya unit usaha ini masih terkendala oleh belum adanya kantor BUMDesa dan gudang penyimpanan yang cukup representatif dan menunjang aktivitas usaha BUMDesa. Namun, dalam rancangan APBDesa Gadungan 2016, pemerintah desa berinisiatif menganggarkan modal penyertaan bagi BUMDesa senilai Rp 40 juta.

## **Ekonomi Desa Berbasis Aset SDA: Kasus Kelompok Tani dan Ternak “Subur”**

Salah satu permasalahan yang muncul dalam bidang ekonomi, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMDes Desa Gadungan 2014-2019, adalah kurangnya penghasilan pertanian. Hal ini bisa menjadi faktor kuat yang mendorong warga untuk mencari alternatif sumber penghidupan. Terobosan yang kemudian dipilih adalah beternak. Pilihan terhadap kegiatan beternak sangat masuk akal mengingat kondisi alam, lahan, dan ketercukupan bahan makan untuk ternak. Tiga aspek inilah yang menjadi faktor pendorong untuk memilih kegiatan beternak. Persoalannya adalah, dari mana modal untuk beternak bisa diperoleh?

Kelompok Tani dan Ternak “Subur” yang didirikan warga Desa Gadungan di tahun 2009 dengan Sutomo sebagai ketuanya menjadi solusi. Selain ketua kelompok tani, Sutomo juga merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gadungan. Dia juga dikenal sebagai salah satu sesepuh desa yang cukup disegani oleh warga. Kelompok tani dan ternak ini memiliki 26 orang anggota yang terdiri dari 23 laki-laki dan 3 perempuan. Setelah melalui musyawarah dengan para anggota, pada tahun 2011, sekitar 9 orang anggota memberanikan diri untuk mengambil kredit usaha pembibitan sapi dan domba dari Bank Jatim sebesar Rp 472 juta. Sebuah nilai yang tentunya tak sedikit.<sup>20</sup>

Tidak semua anggota berani mengambil risiko kredit dari Bank Jatim ini, mengingat se-

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sutomo, Ketua BPD Desa Gadungan dan Ketua Kelompok Tani dan Ternak “Subur” Desa Gadungan pada tanggal 16 Desember 2015 di rumah Bapak Sutomo.



lama ini belum pernah ada yang melakukan pinjaman dalam nominal yang sangat besar bagi ukuran warga desa. Di samping itu, kekhawatiran lainnya adalah karena kegiatan beternak sapi perah merupakan hal yang belum banyak diusahakan warga Desa Gadungan. Modal untuk memulai usaha ini memang tidak sedikit, terutama untuk kebutuhan pembelian dan perawatan sapi perah. Tetapi dengan potensi pangan yang mudah diperoleh serta potensi susu sapi yang setiap hari bisa menghasilkan sekitar 3 liter, beternak sapi perah menjadi salah satu peluang yang bisa dilakukan di tengah kebutuhan ekonomi keluarga.



Gambar 2. Ternak sapi perah warga (doc. IRE)

Kepemimpinan Bapak Sutomo menjadikan kegiatan beternak yang dilakukan kelompok tersebut berjalan dengan baik. Sebagai ilustrasi, setiap harinya satu ekor sapi perah mampu menghasilkan hingga tiga liter susu dengan harga per liternya mencapai Rp 15.000. Setidaknya dalam sehari ada pemasukan sekitar Rp 45.000. Kemudahan mengakses pakan ternak agaknya mampu menekan biaya (*cost*), karena warga yang memiliki sapi perah tidak perlu per-

gi hingga ke luar desa untuk memperoleh pakan ternak. Tidak mengherankan jika dalam waktu sekitar 5-6 tahun, anggota kelompok tani dan ternak ini dapat melunasi kredit di Bank Jatim. Bahkan, menurut penuturan Sutomo, masih ada sisa dana yang rencananya akan dialokasikan untuk syukuran bersama dengan warga desa sebagai bentuk ungkapan syukur atas perolehan pendapatan mereka selama ini. Sejauh ini, rata-rata warga anggota yang mengambil kredit di Bank Jatim telah memiliki 4-12 ekor sapi perah.<sup>21</sup>

Narasi-narasi di atas tentu saja menjadi studi kasus yang menarik. Ini menjadi bukti nyata mengenai tekad warga desa dalam memperluas basis penghidupannya. Dengan kenyataan bahwa kegiatan bertani menjadi kian tak menentu hasilnya, ikhtiar untuk melakukan kegiatan beternak menjadi strategi alternatif warga agar tetap bertahan. Kondisi ini masih ditambah dengan kepekaan dalam melihat potensi aset alam yang sangat kondusif dengan ketersediaan pakan untuk ternak, sesuatu yang membuat modal usaha menjadi tidak terlalu besar dan memberi keuntungan yang optimal.

### Alternatif Ekonomi Perempuan Desa: Kasus Industri Kerupuk Sermilir

Dalam kasus ketiga, ditunjukkan bahwa perempuan desa adalah aktor aktif dalam sumber penghidupan. Keberadaan industri kerupuk berbahan dasar ketela atau yang sering disebut dengan “kerupuk Sermilir” adalah salah satu buktinya. Para perempuan desa yang awalnya

<sup>21</sup> Wawancara dengan Sutomo, Ketua BPD Desa Gadungan dan Ketua Kelompok Tani dan Ternak “Subur” Desa Gadungan pada tanggal 16 Desember 2015 di rumah Bapak Sutomo.

banyak beraktivitas dalam rumah tangga atau membantu berkebun, mulai terlibat dalam kegiatan industri rumah tangga, khususnya produksi kerupuk berbahan dasar ketela itu dalam dua tahun terakhir. Keterlibatan para perempuan desa ini memberi tambahan pendapatan bagi keluarga, terutama yang selama ini hanya mengandalkan pertanian atau perkebunan sebagai sumber penghidupan utama.

Geliat ekonomi lokal ini tidak bisa lepas dari peran Paguyuban Wanita Tani (PWT) “Dewi Mulia” yang berdiri pada 26 Januari 2014. Kelompok ini awalnya dibentuk sekadar untuk menjadi syarat partisipasi warga desa dalam kegiatan pelatihan-pelatihan ekonomi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Mengikuti kegiatan pelatihan menjadi salah satu kegiatan di samping kegiatan *anjingsana* dan kegiatan arisan yang dilakukan secara bergilir yang biasanya diisi dengan diskusi ringan seputar kehidupan warga desa. Menurut Fatmawati, Ketua PWT, anggota dari kelompok ini belum terlalu banyak dan masih terbatas pada ibu-ibu di Dusun Sukomulyo.<sup>22</sup>

Kegiatan industri rumah tangga ini juga tak bisa lepas dari peran pihak eksternal desa yakni pengusaha lokal di Kota Blitar yang melihat potensi komoditas hasil pertanian singkong (*Manihot utilissima*) yang melimpah. Selain itu, ada aset tenaga kerja yang belum dioptimalkan, yakni perempuan desa yang aktivitasnya sebagian besar tak jauh-jauh dari kegiatan rumah tangga. Pengusaha ini lantas mendorong perempuan desa yang ada di kelompok PWT untuk mem-

produksi kerupuk mentah berbahan ketela. Upaya keras pun dijalankan dengan cara mempelajari proses pembuatan kerupuk ketela dari dua warga desa yang telah lebih dulu memiliki keterampilan tersebut.

Salah satu perempuan desa yang berani beranikan diri untuk membuat kerupuk mentah dari bahan ketela adalah Nina Mei Rosida. Sebelum memproduksi sendiri, Nina bekerja di tempat usaha orang lain. Dengan motivasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga ditambah dengan keterampilan yang dimiliki serta dorongan dari organisasi PWT, dia mulai membuat kerupuk mentah berbahan ketela tersebut. Nina pun merekrut empat perempuan desa lainnya sebagai buruh pembuat kerupuk.<sup>23</sup>



Gambar 3. Aktivitas penjemuran industri krupuk rumahan

Aktivitas produksi kerupuk mentah ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang diminati, karena bahan dasar berupa singkong begitu mudah ditemui di Desa Gadungan. Tenaga kerja pun tak menjadi persoalan, karena adanya

<sup>22</sup> Wawancara dengan Fatmawati, Ketua Paguyuban Wanita Tani “Dewi Mulia” Desa Gadungan pada 16 Desember 2015 di rumah ibu Fatmawati.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Nina Mei Rosida, anggota PWT dan pemilik industri rumah tangga kerupuk mentah berbahan ketela pada 16 Desember 2015 di rumahnya.

warga desa yang bersedia untuk bekerja. Kendala utama yang dihadapi adalah cuaca. Musim hujan yang tidak dapat diperkirakan membuat proses produksinya menjadi terhambat. Sebagai catatan, pada waktu kegiatan observasi ini dilakukan, selama seminggu penuh hujan selalu turun sejak siang hingga malam hari. Kondisi ini menjadikan kegiatan industri pembuatan kerupuk juga tidak bisa berjalan dengan lancar.<sup>24</sup> Selama ini pun belum ada teknologi pengeringan untuk menggantikan proses penjemuran secara manual.

Persoalan lain yang menjadi dilema adalah soal pemasaran. Sejauh ini, pemasaran selalu mengandalkan pengusaha lokal yang membantu proses produksi sejak awal. Harganya yang sangat jarang dinaikkan dan relasi sosial yang terlanjur didasarkan pada kultur *pekewuh* membuat hasil industri kerupuk selalu melalui pengusaha lokal tersebut. Kuasa pengusaha ini bahkan hingga pada pemberian label hasil produksi. Nina misalnya, memiliki kode khusus N2 yang tertera pada label produksi. Kode ini akan memudahkan pengusaha lokal ketika komplain atau saat ada hasil kerupuk yang dianggap tidak layak dipasarkan sehingga dapat dengan mudah dikembalikan pada produsennya.

Dengan kata lain, setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi tantangan dalam industri kerupuk ini, yakni: (1) keterbatasan teknologi penjemuran yang masih sangat tergantung pada faktor cuaca dan (2) faktor monopoli pasar oleh pengusaha lokal yang menyebabkan

produsen kerupuk tak memiliki posisi tawar yang baik dalam penentuan harga.

Penghasilan yang diperoleh sebagai pengusaha kerupuk sejatinya cukup menjanjikan. Nina menceritakan bahwa saat musim panas tiba dan proses penjemuran dapat dilakukan secara optimal, dalam sehari dia bisa mengolah singkong mentah hingga kisaran 2 kuintal. Dari jumlah tersebut, dapat dihasilkan sekitar satu kuintal kerupuk mentah. Dia menjual kerupuk mentah per kilo kepada pengusaha lokal seharga 7600/kg. “Ini baru saja naik. Dulu per kilo dihargai sekitar 7200.” Dalam satu bulan, dia bisa memperoleh pendapatan bersih sekitar 3-4 juta. Sementara warga yang bekerja di industri rumah tangga memiliki dua model jam kerja. Jika bekerja mulai jam 05.00-14.00, buruh tersebut akan memperoleh upah Rp 20.000. Namun jika bekerja mulai jam 05.00-16.00, mereka akan mendapatkan upah hingga Rp 25.000. Memang pendapatannya tidak terlalu besar, tetapi karena sebagian besar tenaga kerja rumahan ini menjadikan kegiatan pembuatan kerupuk ini sebagai pekerjaan sambilan atau “pengisi waktu,” model dan kebijakan ini pun berjalan dengan baik.<sup>25</sup>

Faktor produksi utama, seperti bahan baku dan tenaga kerja di Desa Gadungan, relatif tak menjadi persoalan. Sebagaimana dalam konteks ternak sapi perah, bahan baku untuk membuat kerupuk bisa diperoleh dengan mudah di Desa Gadungan yang petaninya juga menanam lahan kebunnya dengan tanaman singkong. Hal ini terbukti mampu menekan *cost* produksi. Se-

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Nina Mei Rosida, anggota PWT dan pemilik industri rumah tangga kerupuk mentah berbahan ketela pada 16 Desember 2015 di rumahnya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Nina Mei Rosida, anggota PWT dan pemilik industri rumah tangga kerupuk mentah berbahan ketela pada 16 Desember 2015 di rumahnya.

lain itu, tenaga kerja juga hampir semuanya berasal dari warga sekitar meski upah yang diperoleh nyatanya tak terlalu besar. Tetapi karena alasan “mengisi waktu luang” dan “daripada menganggur di rumah,” akhirnya upah berapapun akan diterima. Kondisi pengupahan ini sebenarnya hanya imbas dari kebijakan monopoli penjualan yang hanya terpusat di satu pengusaha yang mampu menentukan harga jual.

### **Mendiskusikan Aset Desa dan Sumber Penghidupan Warga**

Tiga cerita di atas memberi arti penting bahwa aset desa baik yang berupa alam hingga aset fisik mampu memberikan manfaat bagi penghidupan warga. Meski aset desa belum ditata seturut mandat regulasi UU Desa, studi di Desa Gadungan ini menyadarkan kita bahwa melimpahnya aset yang ada di desa tidak bisa serta-merta disia-siakan begitu saja. Diperlukan langkah strategis untuk melakukan proses inventarisasi agar pemanfaatannya tidak hanya kepada desa atau bahkan sekadar elitnya, namun lebih dari itu mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga desa.

BUMDesa yang mengelola pasar desa adalah salah satu contoh menarik. Tendensi yang selama ini berlangsung adalah bahwa pasar desa terletak di desa, namun pengelolaannya ada di Dinas Pasar atau institusi pemerintahan lainnya. Desa memang mendapat bagian, namun dengan persentase yang kecil. Namun, hal ini berbeda dengan pasar desa di Desa Gadungan. Pemerintah desa mengambil kebijakan untuk menyerahkan aset pasar desa menjadi salah satu unit usaha BUMDesa. Pengelolaan ini juga tidak

main-main, karena diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur soal pasar desa. Hal ini sekaligus potret nyata bagaimana desa berdaya dan mandiri dalam konteks ekonomi.

Optimalisasi aset sumber daya alam untuk menggerakkan aktivitas ekonomi warga juga terlihat dari kasus ternak sapi dan industri kerupuk berbahan dasar ketela. Melimpahnya pakan ternak maupun produksi ketela betul-betul dimanfaatkan warga untuk menggerakkan ekonominya. Hal ini membuktikan kecermatan warga desa untuk menggerakkan aset dan potensi yang ada di sekitarnya. Tetapi, yang patut dicatat adalah adanya peran pihak ketiga dalam aktivitas ternak sapi perah maupun industri kerupuk.

Dalam konteks pihak ketiga, faktor perbankan daerah menjadi pengungkit penting yang mendorong warga mengambil kredit dan beternak sapi perah. Sementara adanya pengusaha lokal yang menguasai jaringan pemasaran adalah faktor penting dalam mata rantai industri kerupuk. Perbedaannya adalah faktor perbankan tidak selamanya melekat dalam mata rantai penghidupan warga yang bekerja di sektor ternak sapi perah, sementara peran dan intervensi pengusaha lokal dalam proses industri kerupuk dipastikan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Situasi ini penting dicermati pihak desa agar ada jalan keluar yang baik dan menguntungkan semua pihak. BUMDes bisa menjadi salah satu solusi untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh warga desa yang aktif dalam industri kerupuk.

Tabel 1. Aktivitas Ekonomi Lokal Desa Gadungan

Aktivitas Ekonomi	Institusi Lokal	Warga Terlibat	Strategi Nafkah	Tata Kelola ( <i>Governance</i> )	Kepemilikan Aset	Posisi Kelompok Perempuan dan marjinal
Kegiatan beternak	Kelompok tani dan ternak	Anggota kelompok	Perluasan sumber penghidupan disebabkan kegiatan bertani tidak lagi bisa diandalkan hasilnya. Melakukan kerjasama dengan Bank untuk mendapat modal dan membuka kegiatan beternak	Intervensi pemerintah desa dan daerah tidak banyak. Yang muncul adalah keberanian lokal untuk berinteraksi dengan sebuah bank.	Terjadi perluasan kepemilikan aset. Warga memiliki sapi perah antara 4-12 ekor yang setiap hari bisa diperah susunya.	Tidak banyak warga perempuan atau dari kelompok marjinal yang terlibat dalam kegiatan ini.
Industri rumah tangga	Paguyuban Wanita Tani	Perempuan desa	Mengolah bahan mentah yakni ketela yang ada di desa sehingga menjadi bahan jadi (kerupuk mentah)	Intervensi pemerintah minimalis dan lebih banyak berinteraksi dengan pengusaha lokal yang menguasai jaringan pemasaran. Ada lingkaran bisnis yang saling berkaitan yakni pengusaha lokal-pemilik industri kerupuk dan buruh industri kerupuk.	Aset terbesar ada di pengusaha lokal karena mendapat keuntungan maksimal. Pemilik industri rumah tangga memiliki aset tambahan yang relatif cukup dan yang paling buntung adalah buruh industri karena tidak banyak memiliki aset	Para perempuan banyak beraktivitas di sektor ini. Ada dua jenis, yakni perempuan sebagai pemilik industri dan perempuan yang menjadi buruh industri rumah tangga. Perempuan buruh ini yang masuk dalam kategori marjinal.
Pasar Desa	BUMDesa	W a r g a Desa	Sumber penghidupan berbasis aset fisik atau aset ekonomi	Potret intervensi yang maksimal dari pemerintah desa melalui BUMDes	Aset desa yang dikuasai desa dan dimanfaatkan oleh warga	Banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan di pasar desa, tetapi eksistensi kelompok marjinal tidak terlalu terlihat.
Air bersih	BUMDesa	W a r g a Desa sebagai pelanggan	Pemanfaatan sumber mata air	Pengambilalihan tata kelola ke BUMDesa (sebagai salah satu unit usaha)	Aset eks PNPM yang saat ini diserahkan ke desa	Pengakses, karena keterjangkauan biaya

Sumber: Anwar dan Angga (2016)

Berkaca pada tiga kasus di atas, penting bagi desa untuk segera menyusun strategi, kebijakan, hingga peta jalan (*road map*) optimalisasi aset dalam upaya menggerakkan penghidupan warga desa. *Road map* yang dimaksud adalah segera memulau identifikasi aset desa dan memanfaatkannya dalam kebijakan perencanaan pembangunan. Kasus pasar desa yang dikelola

BUMDes adalah praktik yang menarik dan positif dalam upaya identifikasi aset yang dilanjutkan dengan optimalisasi penghidupan warga.

Tetapi, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal dalam dinamika penghidupan dan aktivitas ekonomi di desa. Dalam industri kerupuk, sebetulnya terlihat dua posisi yang berbeda bagi kelompok perempuan.

Pada satu sisi, pemilik atau penggerak utama industri kerupuk adalah para perempuan atau ibu rumah tangga. Tapi di sisi lain, perempuan juga banyak yang menjadi buruh dengan upah *ala* kadarnya karena dianggap sebagai “mengisi waktu senggang”.

Dua posisi perempuan yang berbeda ini terkait kuasa dan akses terhadap sumber daya yang ada. Perempuan pemilik industri kerupuk adalah potret perempuan yang memiliki kemampuan dan daya yang cukup untuk memperoleh dan mengelola sumber penghidupan yang lebih baik. Pendayagunaan ini tidak hanya terkait soal modal, tetapi juga kemampuan menggerakkan sumber daya SDM perempuan lainnya untuk menjadi tenaga kerja. Sementara potret perempuan yang menjadi buruh merupakan model perempuan di desa yang terbatas daya dan kuasanya. Ia hanya memiliki keahlian untuk membantu proses produksi, tetapi tidak punya modal dan kuasa untuk menjadi pemilik. Aspek lain yang menarik untuk dibicarakan adalah daya aktif institusi lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Mulai kelompok warga yang berbasis perempuan maupun institusi yang disponsori negara, misalnya Badan Usaha Milik Desa, sama-sama bergairah untuk bekerja dan mengembangkan penghidupan warga dengan berbagai variannya.

### **Aset Desa, Perempuan, dan Kelompok Marjinal**

Mencermati tabel 1 di atas, salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal. Kelompok perempuan di Desa Gadungan

bukan entitas tunggal. Ada perempuan desa yang ikut serta dalam organisasi, tapi ada juga yang tidak ikut walaupun secara umum mereka ikut beorganisasi. Jika dicermati, organisasi perempuan yang mulai berkibar adalah Paguyuban Wanita Tani. Organisasi ini memiliki anggota cukup banyak, tetapi terkonsentrasi di satu dusun dan belum menyebar ke berbagai dusun yang ada.

Selain itu, posisi perempuan dalam kegiatan ekonomi juga tidak tunggal. Ada perempuan yang berada dalam posisi tinggi misalnya pemilik industri rumah tangga yang memproduksi kerupuk Sermilir berbahan ketela, tapi ada juga perempuan yang menjadi buruh di industri tersebut dengan upah *ala* kadarnya. Faktor keterbatasan jaringan pemasaran menjadi salah satu kendala ketidakmampuan pemilik industri kerupuk untuk memberi upah yang lebih baik.

Sementara kelompok marjinal di Desa Gadungan dapat dilihat dari dua aspek, yakni minoritas dalam hal agama, yaitu masyarakat yang memeluk agama Kristen, dan dari sisi sosial, yakni masyarakat yang tidak memiliki lahan padahal bekerja di sektor pertanian dan atau perkebunan. Untuk kelompok marjinal berbasis agama tidak memiliki persoalan serius dalam konteks sumber penghidupan dan beragama. Mereka tetap bisa bekerja dan menjalankan keyakinannya tanpa ada halangan berarti. Hal berbeda ada pada kelompok marjinal dalam konteks sosial-ekonomi. Dengan keahlian utama dalam bidang pertanian dan atau perkebunan tetapi tidak memiliki lahan, mereka sedang berjuang untuk dapat memiliki lahan yang bisa digarap.

## Simpulan

Bahasan di atas menunjukkan bahwa aset desa memiliki peran signifikan dalam menopang dan menggerakkan sumber penghidupan warga. Di tengah keterbatasan lahan yang ada di desa, pemetaan aset desa sebagaimana menjadi amanat UU Desa sangat penting dilakukan, terutama untuk memastikan bahwa aset yang ada bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai ancaman kerentanan di desa. Salah satu perspektif yang penting dijadikan pijakan adalah cara pandang *livelihood* agar hasil dari pemetaan aset bisa dimanfaatkan warga dan desa untuk mengembangkan tata kelola ekonominya. Hal ini tentu sejalan dengan pandangan Islam, khususnya salah satu aspek dari *maqashid al-syariah*, yakni menjaga harta (*hifzh al-mal*), di mana aset tentu menjadi bagian dari harta yang harus dijaga untuk menjadi instrumen kesejahteraan warga.

Pembelajaran yang tidak kalah menarik adalah perluasan basis sumber penghidupan warga. Walaupun pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung penghidupan warga, ikhtiar mengembangkan industri kerupuk di mana warga berupaya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi adalah upaya yang luar biasa. Hal ini tentu menunjukkan bahwa warga dan desa sebaiknya tidak menggantungkan pada satu sumber penghidupan saja. Mereka harus terus berusaha memiliki dan mengembangkan sumber penghidupan yang lain, tetapi tetap berpijak pada aset yang dimiliki.

Dalam konteks ini, pemetaan aset desa menjadi penting untuk menjadi instrumen perluasan sumber penghidupan warga dan desa. Yang perlu menjadi catatan adalah ketika

melakukan pemetaan aset desa, sebaiknya juga menyinggung soal faktor kepemilikan dan akses terhadap aset desa tersebut. Hal ini terutama untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok marginal di desa juga memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan aset desa.

Lebih dari itu, dinamika ekonomi perempuan desa, sebagaimana kasus Desa Gadungan, memerlukan tidak hanya dukungan kelembagaan, seperti pengorganisasian kelompok dan bekal keterampilan, tetapi juga diperlukan dukungan akses pemasaran yang mengintegrasikan ekonomi lokal desa ke dalam pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih luas di daerah maupun ke luar daerah. Hal ini juga dapat dikoneksikan dengan kelembagaan BUMDes, di mana nanti dapat dikembangkan unit usaha pemasaran industri warga. Integrasi usaha warga ke dalam lembaga desa semacam BUMDes tentu akan memberikan keuntungan lebih besar kepada pemerintah desa.

## Referensi

- Anwar, M. Zainal dan Angga, Rajif Dwi, "Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Aset Desa: Studi Kasus Desa Gadungan, Kab Blitar Jawa Timur," *Laporan Riset, Kerjasama Program IRE Yogyakarta, Knowledge Sector Initiative, dan OXFAM Great Britain*, 2016.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia, 2000.
- Dharmawan, Arya Hadi, "Kata Pengantar", dalam Sunaji Zamroni, dkk., *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Yogyakarta: IRE, 2015.
- Haryanto, Titok, "Warga Bergerak Melawan

- Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Research report* dalam program bertajuk “Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”, IRE Yogyakarta bekerjasama dengan AUSAID ACCESS Tahap II, 2012.
- IRE, CCES dan HIVOS, “Manfaat Program HIVOS Terhadap Desa Mandiri, Berdaulat dan Demokratis,” *Laporan Tengah Program*, Juli, 2015.
- Ja’far, Marwan, “Kata Pengantar,” dalam Sunaji Zamroni, dkk., *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Yogyakarta: IRE, 2015.
- Mariana, Dina dan Eko, Sutoro, “Memanfaatkan Modal Sosial Menjadi Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Research report* dalam program bertajuk “Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”. IRE Yogyakarta bekerjasama dengan AUSAID ACCESS Tahap II, 2012.
- Qomariyah, Puji dan Kurniawan, Borni, “Perempuan Soreang Melawan Rejim Pasar Uang: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan,” *Research report* dalam program bertajuk “Manfaat program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”. IRE Yogyakarta bekerjasama dengan AUSAID ACCESS Tahap II, 2012.
- Sanusi, Anwar, “Orientasi Kebijakan Nasional tentang Implementasi UU Desa,” *Paper Discussion* pada diskusi IRE Yogyakarta, 2015.
- Sutoro, Eko, dkk, *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur*, Yogyakarta: IRE dan ACCESS Phase II, 2013.
- Venny, Adriana, “Perempuan Dalam Dimensi Kemiskinan,” dalam *Jurnal Perempuan* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, No 42, 2005.
- Zamroni, Sunaji dkk, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Yogyakarta: IRE, 2015.
- ### Wawancara
- Wawancara dengan Widodo, Kepala Desa Gadungan pada tanggal 14 Desember 2015.
- Wawancara dengan ibu Nur, pedagang di pasar desa Desa Gadungan pada 17 Desember 2015.
- Wawancara dengan Sutopo, Kaur Pemerintahan Desa Gadungan pada 17 Desember 2015.
- Wawancara dengan Suryadi, Pengelola BUM Desa Gadungan pada tanggal 14 Desember 2015.
- Wawancara dengan Sutomo, Ketua BPD Desa Gadungan dan Ketua Kelompok Tani dan Ternak “Subur” Desa Gadungan pada tanggal 16 Desember 2015.
- Wawancara dengan Fatmawati, Ketua Paguyuban Wanita Tani “Dewi Mulia” Desa Gadungan pada 16 Desember 2015.
- Wawancara dengan Ibu Nina Mei Rosida, anggota PWT dan pemilik industri rumah tangga kerupuk mentah berbahan ketela pada 16 Desember 2015.